

Rekap Permintaan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Bulan	Surat	Jumlah
1.	Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan data kegiatan/event nasional dan internasional tahun 2025 - Permintaan data untuk penyusunan provinsi sumatera barat dalam angka tahun 2025 - Permintaan Data tarif angkutan barang di wilayah provinsi Sumatera Barat - Data laporan paket pekerjaan yang tidak sesuai tahun 2024 	4
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	- Permohonan informasi publik	1
5.	Mei	-	-
6.	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan data populasi internal dan eksternal E-SPJ tahun 2025 - Permintaan data pegawai 	2
7.	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan data dalam rangka memenuhi permintaan ditintelkam polda sumbar - Permintaan data pemilik dan pengusaha angkutan di wilayah Sumatera Barat - Permintaan data spasial jalan dan LHR 	3
8.	Agustus	- Permintaan data untuk perhitungan indeks ketahanan air wilayah sungai	1
9.	September	- Permintaan data dari sekretariat daerah	1
10.	Oktober	- Permohonan permintaan data muzaki unit pengumpulan zakat (UPZ)	1
11.	November	-	-
12.	Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan data pelaksanaan pekerjaan tahun 2025 - Permintaan data calendar of events 2026 - Permintaan data standar pelayanan untuk SMU pada TPT dan PBM dan Perizinan SPM 	3
Jumlah			16

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menerima sebanyak 16 (enam belas) permohonan informasi publik. Permohonan informasi tersebut berasal dari berbagai kalangan, baik instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang membutuhkan data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Sumatera Barat.

Permohonan informasi yang diterima didominasi oleh permintaan data statistik sektoral, data kegiatan dan program, data transportasi, data kepegawaian, data infrastruktur transportasi, serta data pendukung lainnya. Dari seluruh permohonan yang diterima, sebagian besar dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.